



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

AJANGALE



**RENCANA KERJA
(RENJA)**



TAHUN

2023





BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BONE,



[Handwritten signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



[Handwritten signature]
ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN XLIX

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE

TAHUN 2023

RENCANA KERJA
KEGAMATAN AJANGALE
KABUPATEN BONE
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Renja tahun 2023. Rancangan Renja ini merupakan wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Renja Kecamatan Ajangale tahun 2023.

Rancangan Renja tahun 2023 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Ajangale tahun 2021 dan 2022 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2023 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Rancangan Rencana Kerja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolak ukur kinerja yang bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Ajangale dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Demikian Rancangan Rencana Kerja ini kami di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kecamatan Ajangale di Tahun 2023.

Pompanua, 25 Juli 2022
CAMAT AJANGALE

H. AMIRAT, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
Nip. 19681015 198912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ajangale Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ajangale	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan	22
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Kecamatan Ajangale	37
3.3 Program dan Kegiatan Sesuai dengan Permendagri 90	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
BAB V PENUTUP	48

LAMPIRAN

1. Cascading Kinerja Renja Kecamatan Ajangale Tahun 2023
2. Rumusan Program, Kegiatan & Pendanaan Renja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
(Cetakan SIPD) Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Ajangale, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Ajangale dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ajangale Tahun 2023 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023, Renstra Kecamatan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk

pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

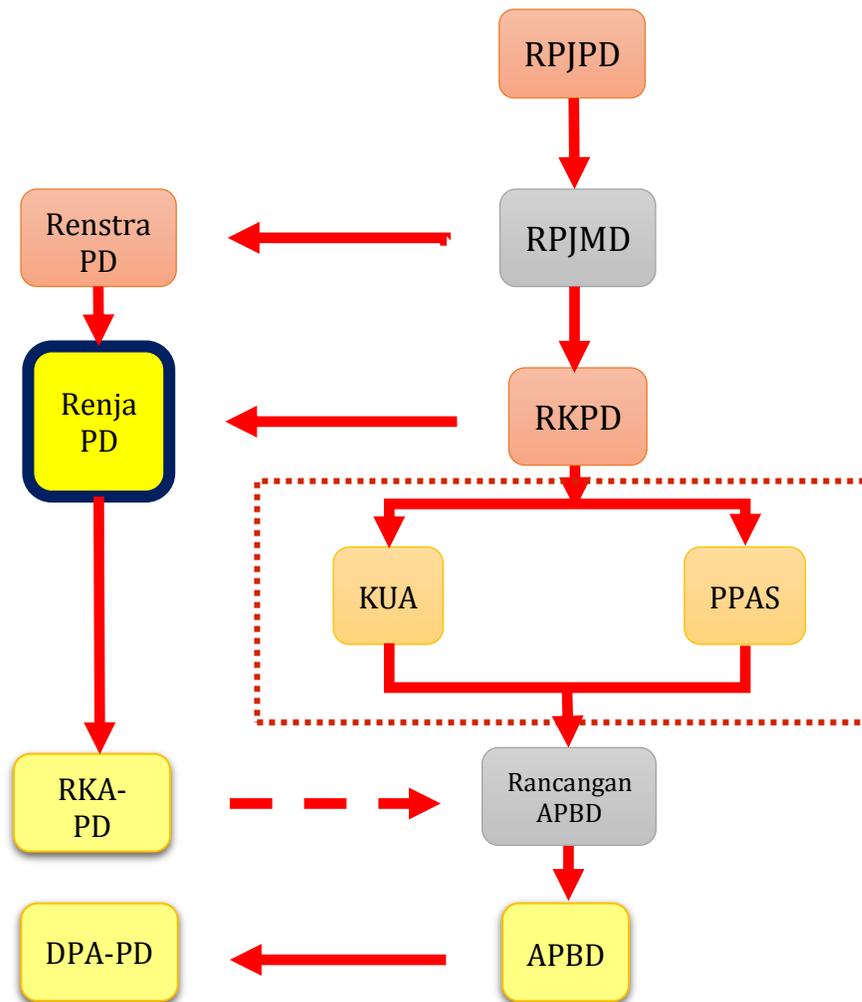
Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keterkaitan antara Renja dan RKPD serta Renstra, tindak lanjut proses penyusunan RAPBD dan Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ajangale dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang

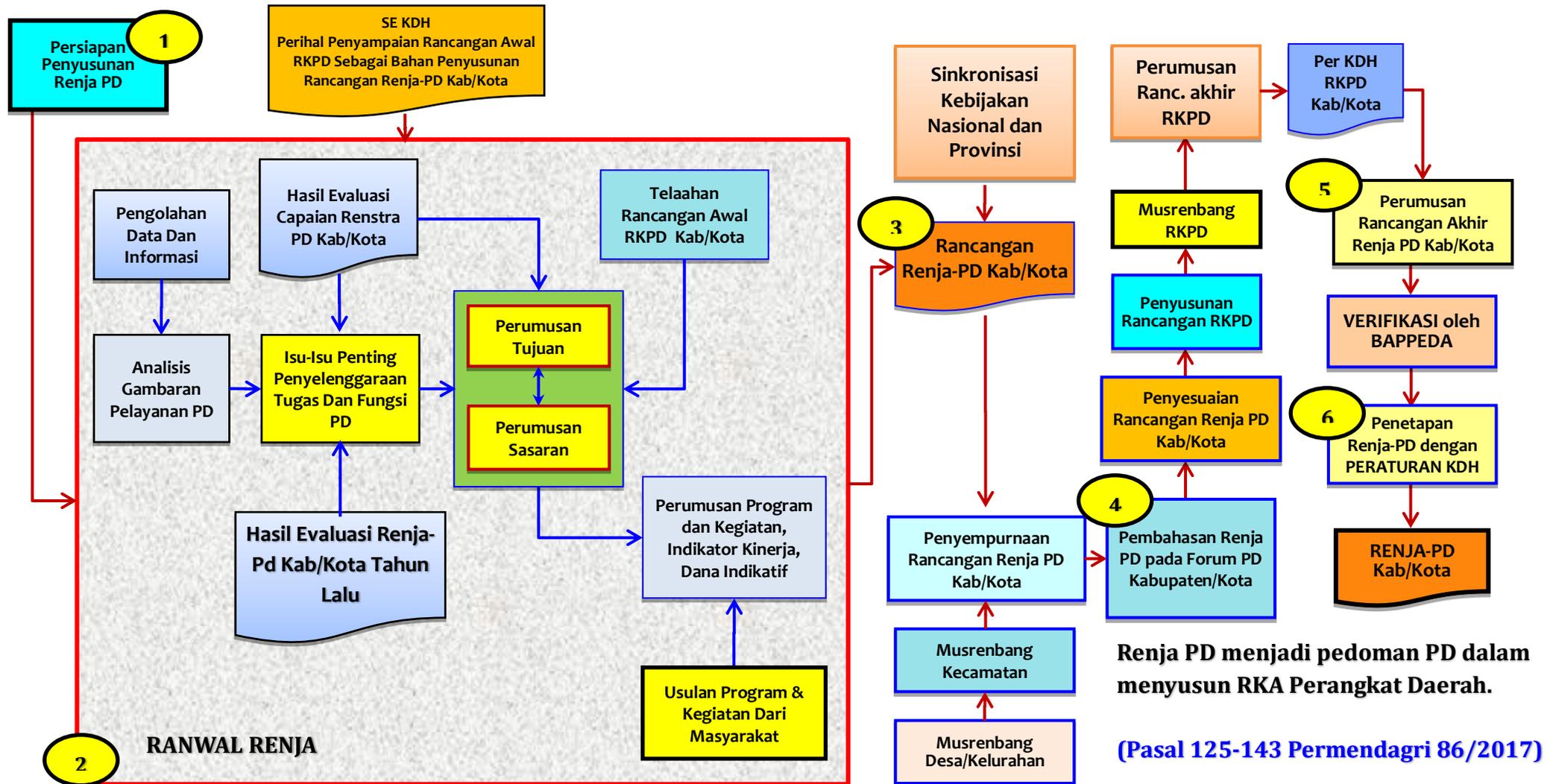
dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrembang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ajangale Kab. Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Landasan Idil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan

- Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94);
40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kecamatan Ajangale Kab. Bone Tahun 2023 ini disusun dengan *maksud* sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ajangale Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Kecamatan Ajangale Kab. Bone pada Tahun 2023.

Adapun *tujuan* penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ajangale Kab. Bone Tahun 2023 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Ajangale Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Ajangale Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ajangale Tahun 2023 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Ajangale Kab. Bone Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ajangale Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ajangale

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Ajangale merupakan dokumen Perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Kecamatan Ajangale. Tercapai atau tidaknya atas pelaksanaan kegiatan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Ajangale menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ajangale selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target 2023.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Ajangale 2021 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022, dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, yang kesemuanya itu tertuang dalam Tabel 2.1 (T-C.29) berikut :

Tabel 2.1 (T-C. 29)
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri 90
 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ajangale

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d tahun berjalan					
					Target Renja Kecamatan Tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	01	01	2	01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15	35	35	35	100%	15	85	66%

7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	6	7	7	7	100%	6	20	33%
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	7	7	7	100%	1	15	15%
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	7	7	7	100%	1	15	15%
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	6	7	7	7	100%	6	20	33%
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	1	7	7	7	100%	1	15	15%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114	12	12	12	96%	114	138	210%
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114	12	12	12	96%	114	138	50%
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50	0	50	0	0%	50	50	10%

7	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Pasang)	30	0	30	0	0%	30	30	100%
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	20	0	20	0	0%	20	20	100%
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	360	362	474	464	467%	310	1136	155%
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	60	60	60	52	86%	10	130	166%
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	60	60	58	96%	12	132	110%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	12	60	60	100%	12	84	70%
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	12	12	108	108	100%	12	132	110%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti (Kegiatan)	264	218	218	186	85%	264	700	651%

7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	6	9	5	100%	4	15	87%
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	0	1	0	0%	0	1	100%
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	3	2	3	0	0%	0	5	66%
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	4	5	5	100%	4	13	25%
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	1020	1020	1009	169%	1032	3061	96%
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	36	36	25	69%	36	108	30%
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	12	984	984	984	100%	996	2964	975%
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51	48	60	59	197%	7	114	90%
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	48	48	48	47	97%	4	100	83%

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	3	0	12	12	100%	3	15	25%
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100%							
7	01	02	2	01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>64%</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>30%</i>
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1	1	1	1	64%	1	3	30%
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%							
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>97%</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>50%</i>
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	2	2	1	97%	2	6	30%

7	01	03	2	02		<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</i>	4	4	4	3	199%	4	11	75%
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)	2	2	2	2	100%	2	6	30%
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	2	2	2	1	99%	2	6	30%
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100%							
7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	12	12	12	12	98%	12	36	30%
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	12	12	12	98%	12	36	30%
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100%							

7	01	06	2	01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	24	12	12	12	100 %	12	36	50%
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	0	0	0	0%	0	0	0%

Sumber Data : Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan Dokumen LPPD Tahun 2021 Serta Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Realisasi Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Triwulan I) – Kecamatan Ajangale

JENIS BELANJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA PEGAWAI	8.513.405.316	8.213.969.563	96,48	9.023.542.678	1.770.287.511	19,62
BELANJA BARANG DAN JASA	235.502.500	225.180.057	95,62	317.955.600	126.143.200	16,92
BELANJA MODAL	16.630.000	16.630.000	100	182.662.600	35.115.000	58,41
JUMLAH	8.765.537.816	8.455.779.620	96,49 %	9.524.160.878	1.896.430.711	36 %

Pada tabel ini disajikan target dan realisasi Anggaran pada Tahun 2021, serta Target dan perkiraan capaian kinerja Tahun 2022 (Tahun Berjalan) dengan rincian indikator kinerja dan target serta realisasi Keluaran (Output). Secara pencapaian kinerja Kecamatan Ajangale bisa dikatakan berjalan dengan sesuai target dan capaian kinerja yang diharapkan, begitu juga target sasaran dan capaian kinerja dalam Renstra sudah terlaksana dengan baik pula. Anggaran yang ada pada Tahun 2021 telah terlaksana sebesar 96,49 % artinya bisa dikatakan berhasil, namun dikarenakan adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 akibat Covid - 19 yang kegiatannya tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang mendekati akhir tahun sehingga tidak bisa dilaksanakan 100% dan pada tahun berjalan 2022 belum bisa dilakukan pengukuran keseluruhan karena masih sementara berjalan satu triwulan dan dapat diukur dengan nilai triwulan Pertama sebesar 36%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui Penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan kinerja.

Kecamatan Ajangale sebagai salah satu, perngkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat ditingkat kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Ajangale yang dijabarkan ke dalam Tabel 2.2 (T-C.30) berikut :

Tabel 2.2 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ajangale
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tujuan : <i>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale</i>											
Sasaran : <i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</i>											
01	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP			B	A	A	A	BB 79,23 %	Proses	A	A
Catatan Analisis	<p>Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Ajangale Kab. Bone telah mencapai predikat BB (Nilai 79,23) Pada tahun 2021, Capaian kinerja indikator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021 yang ditargetkan pada predikat B.</p> <p>Namun demikian, masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Ajangale Kab. Bone, yaitu predikat A. Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi SAKIP diseluruh tahapan kinerja. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh PemKab. Bone dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui tahapan perubahan Renstra serta monev kinerja secara berkala baik di internal OPD/Kecamatan.</p>										
02	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan			98 %	100 %	100 %	100 %	99 %	Proses	100 %	100 %
Catatan Analisis	<p>Hingga tahun 2021, realisasi capaian kinerja untuk sasaran ini melebihi target kinerja yang ditetapkan, yaitu 99% dari target 98%. Untuk tahun 2022, proses pelayanan kepada masyarakat masih terus berproses. Selain itu, laporan pengaduan masyarakat lebih banyak di sampaikan ke APH (Kepolisian atau Kejaksaan) sebelum dilimpahkan ke Kecamatan. Namun demikian, Peran Kecamatan kedepannya masih perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi, asistensi ataupun pendampingan Kepada Masyarakat.</p>										

Sumber Data : Renstra Perubahan Kecamatan Ajangale Kab. Bone Tahun 2018-2023, Laporan Kinerja Tahun 2021

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ajangale

Secara umum isu-isu penting strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Ajangale adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku Jabatan Fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat Ajangale.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Ajangale sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Ajangale harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
 - * Struktur Organisasi Kantor Camat Ajangale Kabupaten Bone Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
 - * Situasi Kantor Yang Kondusif Sehingga Tercipta Hubungan Kerja Yang Harmonis Antar Aparatur Yang Sangat Bermanfaat Dalam Mengembangkan Kreativitas Individual Maupun Kelompok (Team Work).

RENJA 2023 KEC. AJANGALE

- * Ketersediaan Sarana Informasi Yang Berbasis Teknologi Sehingga Memudahkan Komunikasi Dengan Instansi Terkait.
 - * Sarana Dan Prasarana Kerja Di Kantor Camat Meskipun Dengan Segala Keterbatasan Kualitas Dan Kuantitas Namun Sangat Membantu Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-Hari.
 - * Hubungan Kerja Yang Baik Dan Dinamis Dengan Organisasi Perangkat Daerah Terkait.
 - * Kemampuan Menggalang Stakeholder Dalam Mengkoordinasikan Penerapan Kebijakan Bupati
2. Adapun Permasalahan Yang Bisa Menghambat Pencapaian Target Kinerja Adalah:
- * Masih Lemahnya Pemahaman Tupoksi Para Aparat Pemerintah Kecamatan Mengakibatkan Tidak Maksimalnya Hasil Koordinasi.
 - * Skill Aparatur Yang Memegang Jabatan Fungsional Masih Rendah.
 - * Masih Adanya Aparatur Sipil Negara Yang Belum Bisa Mengoperasikan Perangkat Computer.
 - * Sarana Dan Prasarana Kantor Yang Belum Memadai Baik Dari Segi Kualitas Maupun Kuantitas.
 - * Mekanisme Dan Pola Kerja Yang Belum Tertata Dalam Suatu Sistem Yang Terpadu, Efektif Dan Efisien.
 - * Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Camat Ajangale Terutama Pada Jajaran Kasubag Yang Masih Banyak Kosong.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa tantangan serta peluang dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Tantangan yang berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut :
 - * Kurangnya pemahaman mengenai UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Permenpan No.36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.

RENJA 2023 KEC. AJANGALE

- * Sumber daya Manusia.
 - * Kemauan dan itikad pelaksana.
2. Peluang yang berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut :
- * Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ajangale maupun Pemerintah Daerah;
 - * Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Ajangale untuk memacu dan memotivasi peningkatan pelayanan publik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajangale serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Ajangale diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Adapun review terhadap Rancangan awal Kecamatan Ajangale tertuang dalam tabel 2.3 (T-C.31) berikut ini :

Tabel 2.3 (T-C. 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Ajangale

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Renstra/Renja					Kepmen 050-5889					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ajangale	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100%	10.450.870.296	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ajangale	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah (%)	100%	8.958.340.334	<i>Terjadi perbedaan Indikator yang disesuaikan dengan Permendagri 050-5889 Tahun 2021 yang terkait dengan Sub Kegiatan</i>
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kecamatan Ajangale</i>	<i>Persentase Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)</i>	<i>100%</i>	<i>44.813.670</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kecamatan Ajangale</i>	<i>Persentase Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(%)</i>	<i>100%</i>	<i>32.202.000</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	6	27.378.670	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat (Dokumen)	6	9.740.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.513.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.102.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	6	4.235.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	17.287.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	1	4.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2.560.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	9.894.668.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ajangale	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	8.483.025.534	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ajangale	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	9.894.668.300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ajangale	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	114	8.483.025.534	

	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kecamatan Ajangale</i>	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (%)</i>	<i>100%</i>	<i>260.924.824</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kecamatan Ajangale</i>	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (%)</i>	<i>100%</i>	<i>164.392.850</i>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	60	36.905.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60	27.313.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	53.299.290	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	38.309.250	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	12.729.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12.150.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Bulan)	12	4.356.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	264	153.635.334	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	264	85.420.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Ajangale	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	16.056.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Ajangale	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	34.238.950	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	16.056.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	34.238.950	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ajangale	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	108.490.542	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ajangale	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	187.957.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ajangale	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	38.073.188	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	25.989.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (OB)	996	70.417.354	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	161.967.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ajangale	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	125.916.260	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ajangale	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	56.524.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Kali)	48	102.984.794	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	43.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	22.931.466	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ajangale	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita (Unit)	1	13.524.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ajangale	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100%	33.600.490	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ajangale	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100%	20.723.000	
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)</i>	<i>100%</i>	<i>33.600.490</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)</i>	<i>100%</i>	<i>20.723.000</i>	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1	33.600.490	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	20.723.000	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ajangale	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	663.994.760	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ajangale	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (%)	100%	399.000.000
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)</i>	100%	63.834.760	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)</i>	100%	15.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	63.834.760	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	15.000.000
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana (%)</i>	100%	600.160.000	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana (%)</i>	100%	384.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)	2	592.900.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	300.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	2	7.260.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	4	84.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ajangale	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100%	32.670.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ajangale	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100%	27.000.000
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100%	32.670.000	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)</i>	100%	27.000.000

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	32.670.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	27.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ajangale	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100%	4.791.600	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ajangale	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa (%)	100%	6.000.000	
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	<i>100%</i>	<i>4.791.600</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kecamatan Ajangale	<i>Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</i>	<i>100%</i>	<i>6.000.000</i>	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ajangale	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes (Laporan)	12	4.791.600	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	6.000.000	

Sumber Data : Renstra Perubahan Kecamatan Ajangale Tahun 2018-2023, Aplikasi SIPD Tahun 2023 Permendagri 050-5889

Pada table diatas diuraikan secara rinci mengenai Rancangan awal anggaran Kecamatan Ajangale pada RKPD dan analisis kebutuhan tahun 2023. Pada prinsipnya alokasi yang diberikan pada RKPD Tahun 2023 sudah menyesuaikan aspek kebutuhan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera di dalam Renstra Perubahan Kecamatan Ajangale Tahun 2018-2023 dengan Pagu rancangan RKPD sebesar **Rp. 11.185.927.146** sedangkan analisis kebutuhan yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan anggaran yang mengacu kepada kekuatan keuangan daerah dan disepakati menjadi Pagu Renja pokok tahun 2023 **Rp. 9.411.063.534**. Namun pada tahap Indikator Sub Kegiatan mengalami Perubahan atau penyesuaian dengan Kempemendagri 050-5889 Tahun 2021.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan Ajangale dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan – usulan pembangunan kepada Pemerintah (Bottom Up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kabupaten.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021, dengan tema Tahun 2023 secara nasional, yaitu “ *Transformasi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Sosial Masyarakat*” dengan fokus pembangunan diarahkan pada Pemulihan Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan, dan Reformasi Sistem Kesehatan, Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4-6,0 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24-5,52 %;
3. Ratio Gini sebesar 0,376-0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44-73,48;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8-27,1 %;
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-105;
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105;
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5-9,0 %.

Sasaran Dan Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2023 Agar Diselaraskan Untuk Mendukung Pencapaian Pencapaian Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Melalui 5 (Lima) Arah Utama Presiden, Sebagai Berikut:

1. *Pembangunan sumber daya manusia (SDM)*, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. *Pembangunan Infrastruktur*, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,

mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. *Penyederhanaan Regulasi*, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. *Penyederhanaan Birokrasi*, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. *Transformasi Ekonomi*, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. *Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan public*

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan warga Negara Indonesia (wni) di luar negeri.

Adapun Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bone disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3. Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone

No	Nasional	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone
1	Rancangan Teknokratik RPJMD 2020-2024	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan public yang berkualitas
2		Penguatan infrastruktur wilayah	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3		Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya
4		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan Kawasan perdesaan

5		Pembangunan Manusia	Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik
6		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha
7		Pelestarian lingkungan hidup	Stabilitas keamanan, ketertiban, ketenteraman dalam kemajemukan masyarakat

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program Kabupaten Bone.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Kecamatan Ajangale

Perumusan dan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kecamatan ajangale yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Ajangale 2020-2023.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan Rencana Strategis maka kecamatan ajangale mempunyai *tujuan*:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale

Dengan *sasaran* sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3.3 Program dan Kegiatan Sesuai dengan Permendagri 90

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2023, maka Kecamatan Ajangale merumuskan Rencana Kerja Tahun 2023 yang terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan dengan sumber pendanaan Dana Alokasi Umum serta nilai total Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 9.411.063.534. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kejadiannya yang tersebut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

✳ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

✳ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

✳ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

✳ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

✳ **Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

✳ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

✳ **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

✳ **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

✳ **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

✳ **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

✳ **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2023 – Kecamatan Ajangale Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	PROGRAM
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <i>Terdiri dari 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan</i>
		Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik <i>Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan</i>
			✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan <i>Terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan</i>
			✓ Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum <i>Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan</i>
			✓ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa <i>Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan</i>

Sumber Data : Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Ajangale, Renstra Perubahan Tahun 2018-2023



**BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN AJANGALE**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Rancangan Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Ajangale dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Penyusunan Rancangan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Secara lengkap, rumusan rincian rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ajangale Tahun 2023 yang sumber penganggarnya sebagian besar bersumber dari DAU-APBD Kabupaten Bone, maka dalam rangka penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan *e-government* terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang disediakan oleh Kemendagri. Adapun Rumusan Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Ajangale Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel. 4 (T-C.33) : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Ajangale

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahunan 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
7			UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01		KECAMATAN						9,196,016,778			11,644,343,358	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	9,127,293,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	11,495,956,823	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	32,202,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	49,294,537	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	6 Dokumen	9,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	30,116,537
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,513,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4,840,000

RENJA 2023 KEC. AJANGALE

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1,102,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4,840,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	6 Laporan	17,287,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	4,658,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	1 Laporan	2,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4,840,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	8,651,978,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	10,884,135,130
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	114 Orang/Bulan	8,651,978,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	114 Orang/Bulan	10,884,135,130
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	164,392,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	287,017,306
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	60 Paket	27,313,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60 Paket	40,595,500

RENJA 2023 KEC. AJANGALE

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	12 Paket	38,309,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	58,629,219
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	12 Paket	12,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	14,002,120
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	12 Dokumen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	4,791,600
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	264 Laporan	85,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	264 Laporan	168,998,867
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	34,238,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	17,662,370
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	4 Unit	34,238,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	17,662,370
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	187,957,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	119,339,595
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	36 Laporan	25,989,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	41,880,506
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	12 Laporan	161,967,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	77,459,089

RENJA 2023 KEC. AJANGALE

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	56,524,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	138,507,885
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	4 Unit	43,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	113,283,273
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	1 Unit	13,524,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	25,224,612
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	20,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	36,960,539
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	20,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	36,960,539
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	1 Laporan	20,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	36,960,539

RENJA 2023 KEC. AJANGALE

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	70,218,236
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	70,218,236
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	2 Laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	70,218,236
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	35,937,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	35,937,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	12 Laporan	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	35,937,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5,270,760

RENJA 2023 KEC. AJANGALE

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100%	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5,270,760
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	12 Dokumen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	5,270,760
TOTAL									9,196,016,778			11,644,343,358
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua Riattang	100%	186,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	350,025,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua Riattang	100%	186,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	350,025,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua Riattang	1 Unit	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	346,095,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua Riattang	2 Pokmas / Ormas	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Pokmas / Ormas	3,930,000
TOTAL									186,000,000			350,025,000

RENJA 2023 KEC. AJANGALE

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua	100%	198,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	350,025,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua	100%	198,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	350,025,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua	1 Unit	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	346,095,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua	2 Pokmas / Ormas	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Pokmas / Ormas	3,930,000
TOTAL									198,000,000				350,025,000

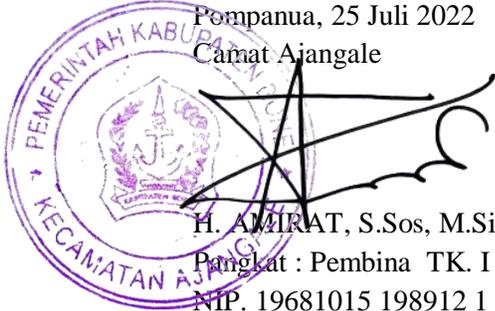
BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ajangale Tahun 2023 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Kecamatan Ajangale Tahun 2018 – 2023 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselenggarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ajangale yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Ajangale untuk menjamin keberhasilan program / kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Ajangale selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2023 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Ajangale tahun 2023 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Ajangale pada periode Tahun 2023. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Ajangale yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang ditetapkan.

Pompanua, 25 Juli 2022
Camat Ajangale



H. AMIRAT, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19681015 198912 1 001

LAMPIRAN 1

Cascading Kinerja Renja Kecamatan Ajangale Kab. Bone Tahun 2023

CASCADING KECAMATAN AJANGALE 2023

VISI				
MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA				
MISI				
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).				
TUJUAN KABUPATEN				
Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN				
SASARAN KABUPATEN				
Berkurangnya kasus KKN				
PENANGGUNG JAWAB				
CAMAT				
TUJUAN KECAMATAN				
TUJUAN KECAMATAN AJANGALE				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ajangale				
SASARAN KECAMATAN				
SASARAN KECAMATAN AJANGALE				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
INDIKATOR TUJUAN				
INDIKATOR TUJUAN				
Hasil Evaluasi Sakip Oleh Apip				
Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan				
PENANGGUNG JAWAB				
SEKRETARIAT				
PROGRAM				
PROGRAM				
PROGRAM				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
INDIKATOR PROGRAM				
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Dana Desa
TARGET				
100%	100%	100%	100%	100%

PERANGKAIAN	Subbag Bagian Program dan Keuangan	Subbag Bagian Program dan Keuangan	Subbag Umum dan Kepegawain	Subbag Bagian Program dan Keuangan	Kasi Pembangunan dan PMD	Seksi Pemerintahan dan Kependidikan, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kasi Tranribum	Kasi Pembangunan dan PMD					
-------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--	----------------	--------------------------

KEGIATAN

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum	Penyediaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah yang berjenis sesuai rencana kebulatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum	Persentase Realisasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

SUB KEGIATAN

SUBKEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Milar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dipin Pegawai	Pengadaan Pakan Dinas sesuai kebutuhan	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perantara penunjang undangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional dan Lapangan	Pengadaan Mebel	Pengadaan Perabotan dan Meubel Lainnya	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Data Ar dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas dan Kendaran Dinas Jabatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sinergis dengan Kepala Desa	Penyediaan Fasilitas Perencanaan dan Peraturan Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Milar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Milar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Dipin Pegawai	Jumlah Paket Pakan Dinas sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perantara penunjang undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Perabotan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaran atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dipelihara Dinas Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Dibahas dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
TARGET	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	1 Laporan	12 Orang/Bulan	30 Unit	30 Paket	40 Paket	12 Paket	12 Dokumen	264 Laporan	1 Unit	3 Unit	4 Unit	3 Unit	1 Laporan	2 Laporan	2 Unit	2 Pokmas/Ormas	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan			

CAMAT AJANGALE

H. AMIRAT, S.Sos, M.Si
 Camat
 Nip : 19681015 198912 1 001

LAMPIRAN 2

Rumusan Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja Kecamatan Ajangale Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (Cetakan SIPD)

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ajangale
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ajangale

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN															
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	100 Persen	9,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	30,116,537
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,513,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,840,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,102,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,840,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Laporan	100 Persen	17,287,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,658,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	2,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,840,000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	114 Orang/Bulan	100 Persen	8,651,978,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	10,884,135,130
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Paket	100 Persen	27,313,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	40,595,500
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	38,309,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	58,629,219

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ajangale
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ajangale

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	12,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	14,002,120
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,791,600
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	264 Laporan	100 Persen	85,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	168,998,867
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34,238,950					17,662,370
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 Persen	34,238,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	17,662,370
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								187,957,200					119,339,595
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Laporan	100 Persen	25,989,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	41,880,506
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	161,967,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	77,459,089
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,524,000					138,507,885
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 Persen	43,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	113,283,273
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 Persen	13,524,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	25,224,612
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								20,723,000					36,960,539
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								20,723,000					36,960,539

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ajangale
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ajangale

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	20,723,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	36,960,539	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							15,000,000						70,218,236	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							15,000,000							70,218,236
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	70,218,236	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							27,000,000						35,937,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							27,000,000							35,937,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100 Persen	35,937,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							6,000,000						5,270,760	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							6,000,000							5,270,760
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Ajangale, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100 Persen	5,270,760	
TOTAL									9,196,016,778					11,644,343,358	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ajangale
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0001 Kelurahan Pompanua Riattang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN															
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua Riattang	100 Persen	1 Unit	100 Persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	346,095,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua Riattang	100 Persen	2 Pokmas / Ormas	100 Persen	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	3,930,000
TOTAL												186,000,000			350,025,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Ajangale
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0002 Kelurahan Pompanua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN															
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua	100 Persen	1 Unit	100 Persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	346,095,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Bone, Ajangale, Pompanua	100 Persen	2 Pokmas / Ormas	100 Persen	48,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	3,930,000
TOTAL												198,000,000			350,025,000		


CAMAT AJANGALE

H. AMIRAT, S.Sos, M.Si
 Pangkat : Pembina TK. I
 NIP. 19681015 198912 1 001